

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Pertanyaan Penelitian	16
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Manfaat Penelitian	17
BAB II KERANGKA TEORI	18
2.1. Kebijakan Publik	14
2.2. Proses Kebijakan Publik	25
2.3. Implementasi Kebijakan	31
2.4. Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian	58
3.2. Lokasi Penelitian	59
3.3. Unit Analisis	60
3.4. Sumber Data	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61

3.6. Uji Keabsahan Data	67
3.7. Analisis Data	68
BAB IV OBJEK PENELITIAN DAN DESKRIPSI KEBIJAKAN	70
4.1. Profil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	70
4.2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	80
BAB V PEMBAHASAN	82
5.1. Pelaksanaan Implementasi	82
5.1.1. Implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2016 pada Biro Hukum	83
5.1.2. Implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2016 pada Seditjen/Itjen	97
5.2. Proses Implementasi	104
5.2.1. Pembentukan Produk Hukum	105
5.2.2. Evaluasi Produk Hukum	129
5.3. Output Implementasi	135
5.3.1. Sebagai Instrumen Pengendalian dan pedoman (SOP) agar tertib administrasi	137
5.3.2. Peningkatan kualitas regulasi	144
5.3.3. Penataan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi	153
BAB VI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERMEN NOMOR 21 TAHUN 2016	166
6.1. Content/Isi Kebijakan	166
6.1.1. Kepentingan yang terpengaruh/terdampak	166
6.1.2. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan	170
6.1.3. Perubahan yang diharapkan	171
6.1.4. Kedudukan Pembuat Kebijakan	172

6.1.5. Para Pelaksana Kebijakan	174
6.1.6. Sumber Daya yang dikerahkan	179
6.2. Konteks Implementasi Kebijakan	187
6.2.1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat	187
6.2.2. Karakteristik lembaga dan penguasa	189
6.2.3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana	192
BAB VII PENUTUP	197
7.1. Kesimpulan	197
7.2. Saran	200

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbandingan Indeks Kualitas Regulasi di Negara ASEAN	3
Tabel 2.1.	Perbandingan model pendekatan <i>top down</i> dan <i>bottom up</i>	52
Tabel 2.2.	Kerangka Pikir	57
Tabel 3.1	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data, Variabel Output Implementasi	63
Tabel 3.2.	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data, Variabel Faktor- Faktor yang mempengaruhi Implementasi	66
Tabel 5.1.	hasil evaluasi peraturan perundang-undangan Tahun 2019	131
Tabel 5.2.	Hubungan Kerangka Regulasi Renstra 2015-2019 dengan Produk Hukum Kementerian ATR/BPN	142
Tabel 5.3.	Data <i>Judicial Review</i> Putusan dan Peraturan Menteri ATR/KBPN setelah Tahun 2016	149
Tabel 5.4.	Penilaian Reformasi Birokrasi	156
Tabel 5.5.	Simpulan Hasil Pembahasan Implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2016	163
Tabel 6.1.	Data Kepegawaian Kepala Bagian Program dan Hukum; dan Kepala Subbagian Hukum di Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal	176
Tabel 6.2.	Data Pegawai Pada Subbagian Hukum Sesditjen/itjen	180
Tabel 6.3.	Data Pegawai pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum	182
Tabel 6.4.	Simpulan hasil pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2016	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Grafik Perbandingan Tingkatan Peraturan	4
Gambar 2.1.	Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	22
Gambar 2.2.	Proses Kebijakan Publik	25
Gambar 2.3.	Gambar Proses Implementasi	41
Gambar 2.4.	Gambaran Kinerja Implementasi	43
Gambar 2.5.	Kerangka Logis Pengukuran Kinerja Implementasi	45
Gambar 3.1.	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaksi	69
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kementerian ATR/BPN	77
Gambar 4.2.	Bagan Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat	79
Gambar 4.3.	Bagan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	79
Gambar 4.4.	Bagan Biro Hukum	80
Gambar 5.1.	Evidence Sosialisasi Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2016	93
Gambar 5.2.	Nota Dinas Biro Hukum Permohonan Penyampaian Usulan Rancangan Peraturan Menteri	108
Gambar 5.3.	Prosedur Tetap Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	118
Gambar 5.4.	Petunjuk Operasional Kegiatan Biro Hukum Tahun 2018-2020 mengenai Evaluasi Peraturan	129
Gambar 5.5.	Undangan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	131
Gambar 5.6.	Evidence kegiatan Penyertaan Perancang Penyusunan Peraturan	146
Gambar 5.7.	Undangan Bimbingan Teknik Penyusunan Produk Hukum	148
Gambar 5.8.	Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri	152